



Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Sidulang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba

Oberlin Pangaribuan^{1*}, Evi Yunita Kurniaty²

^{1,2} Ilmu Pemerintahan, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Medan Area

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2547>

*Correspondence: Oberlin Pangaribuan

Email:

oberlinpangaribuan4@gmail.com

Received: 07-04-2025

Accepted: 16-05-2025

Published: 28-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Abstract: *As one of the villages in Laguboti sub-district, the Sidulang Village Government has an important responsibility and role in empowering farmer groups to be qualified and competitive. However, this is not easy to implement, of course it has several problems. Based on the results of observations made by the author in Sidulang Village, other problems were still found, including: The minimal role of the Sidulang Village Government in assisting farmers in providing routine guidance and training. So the formulation of the problem in this study is to find out the Role of the Sidulang Village Government in Empowering Farmer Groups using a qualitative approach. The results of the study show that the Role of the Sidulang Village Government in empowering farmer groups is reviewed from the first aspect, namely: Regulators regarding the empowerment of community farmer groups generally do not know about the rules and policies that bind the community to be empowered. The second dynamic aspect which then contains sub-indicators (1) socialization, (2) Mentoring, (3) Training and (4) Field visits, shows that from the sub-indicators mentioned, all sub-indicators are still less effective so that improvements are needed in the future. The last is: the aspect of the Facilitator of the availability of seeds, fertilizers, and other means of production that the government as the spearhead of community expectations has tried to provide what is appropriate by fulfilling several tools and other needs.*

Keywords: *Role, Empowerment, Farmer Groups.*

Abstrak: Sebagai salah satu Desa di kecamatan Laguboti, maka Pemerintah Desa Sidulang memiliki tanggung jawab dan peran yang penting untuk memastikan bahwa kelompok tani berkualitas tinggi dan mampu bersaing. Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, tentunya memiliki beberapa permasalahan. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan penulis di Desa Sidulang masih ditemukannya masalah-masalah lain diantaranya: Minimnya keterlibatan dari pemerintah desa untuk mendampingi petani dalam hal memberikan bimbingan dan pelatihan secara rutin. Maka rumusan masalah dalam penelitian ini ingin mengetahui Peran Pemerintah Desa Sidulang dalam Pemberdayaan Kelompok Tani dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah Desa Sidulang dalam pemberdayaan kelompok tani ditinjau dari aspek pertama yaitu: Regulator tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan dan kebijakan yang mengikat masyarakat untuk diberdayakan. Yang kedua aspek dinamisator yang kemudian didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan, keseluruhan sub indikator masih kurang efektif sehingga perlu perbaikan kedepannya. Yang terakhir yaitu: aspek Fasilitator ketersediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah sebagai ujung tombak harapan masyarakat sudah berupaya memberikan yang layak dengan memenuhi beberapa alat dan kebutuhan lainnya.

Kata Kunci: Peran, Pemberdayaan, Kelompok Tani.

Pendahuluan

Sebagai pelaksana utama suatu negara, pemerintah sangat penting baik untuk proses pembangunan maupun keberlanjutan jangka panjangnya, baik dalam pertumbuhan sumber daya manusia, perkembangan infrastruktur dan aspek lainnya, seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945 alinea ke 4 mengenai peran pemerintah bahwasanya pemerintah memiliki peran yang sentral dalam pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat (Ahmar dkk., 2016). Salah satu program pengembangan dan pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat saat ini ialah melalui program pemberdayaan, strategi pembangunan yang dikenal sebagai "pemberdayaan masyarakat" mendorong anggota masyarakat untuk mengambil inisiatif dan memulai kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperbaiki keadaan mereka sendiri. Partisipasi dari masyarakat itu sendiri diperlukan agar pemberdayaan masyarakat dapat terjadi (Saufiah dkk., 2024.). Adapun salah satu strategi pemerintah dalam pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yaitu melalui pemberdayaan masyarakat petani, penting untuk memberdayakan masyarakat tani agar mereka dapat menciptakan kelompok tani yang lebih kreatif, kelompok tani yang lebih mandiri, lebih memperkuat organisasi komunikasi antar team penyuluh lebih baik (Mutmainna dkk., 2016). Tentunya masyarakat berharap kesediaan dan totalitas kinerja pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah terendah (Desa) sebagai garda terdepan dalam membantu, membina dan memberdayakan salah satunya dalam sektor pertanian . Bukan hanya itu saja, pemerintah juga sebagai media dan tempatnya informasi yang diharapkan mampu bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. dalam mewujudkan harapan masyarakat atau petani dalam menangani kelemahan masyarakat dan mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat melalui program pemberdayaan kelompok tani tersebut (Labolo, 2010)

Melihat berbagai problematika naik turunnya taraf hidup masyarakat saat ini, dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengembangan Pelatihan Pertanian, yang dijelaskan dalam Bab III, pemerintah berusaha untuk menetapkan regulasi di sektor pertanian bahwasannya dalam hal mengembangkan kekuatan organisasi kemasyarakatan, maka pemerintah sebagai aparatur Negara memiliki kewajiban dalam membantu dan mengarahkan berbagai bentuk kegiatan yang sudah terencana seperti memberikan fasilitas, memberikan dorongan dan apresiasi serta memberika edukasi dan pelatihan secara langsung (PERMENTAN, 2016). Mengacu pada peraturan diatas, harusnya pemerintah berupaya melakukan pembinaan secara menyeluruh dan rutin kepada seluruh kelompok tani di berbagai daerah pelosok (Desa) demi terwujudnya pola pengembangan dan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu daerah yang menerapkan kebijakan regulasi diatas ialah Kabupaten Hasundutan yang telah diatur pada Peraturan Bupati Toba Nomor 53 Tahun 2021 mengatur tentang pembinaan dan pengembangan kelompok tani yang berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 2013 mengenai pemberdayaan dan perlindungan petani, yang salah satunya mencakup pembinaan kelompok tani melalui berbagai program dan kegiatan. Dalam hal ini, langkah-langkah untuk memberdayakan petani juga sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Agar petani menjadi mandiri dan sangat kompetitif

dalam usaha pertanian mereka, pemberdayaan diterapkan untuk meningkatkan usaha pertanian, membentuk dan memperkuat lembaga petani, serta memajukan dan mengembangkan pola pikir petani.

Sebagai salah satu Desa di Kabupaten Toba, maka Pemerintah Desa sidulang memegang posisi dan tugas yang signifikan dalam memberdayakan kelompok tani agar berkualitas dan mampu berdaya saing. Namun hal tersebut tidak mudah untuk dilaksanakan, tentunya memiliki beberapa permasalahan. Mengamati kondisi petani Desa Sidulang yang sering mengalami kesulitan, hal inilah yang membuat masyarakat setempat membutuhkan keterlibatan dan sosok pemerintah desa. Ketika melihat daerah pertanian, khususnya kelompok tani di Desa Sidulang, jelas bahwa meskipun mereka memiliki banyak lahan yang dapat dikelola, lahan tersebut tidak memberikan manfaat penuh sesuai dengan tujuan yang harus dicapai untuk kesejahteraan dan pembangunan masyarakat. Peningkatan jumlah kelompok tani tersebut belum diikuti dengan peningkatan kualitas sehingga masih banyak kelompok tani belum mampu mandiri atau masih tetap ditentukan dari atas dalam berbagai hal seperti dalam menentukan jenis komoditas yang diusahakan, menentukan pasar, menentukan mitra usaha, menentukan harga komoditas dan sebagainya. Akibatnya, kualitas kelompok tani yang terbentuk tidak dapat berperan sebagai aset komunitas masyarakat desa yang partisipatif, sehingga pengembangannya belum signifikan meningkatkan kapasitas masyarakat itu sendiri untuk menjadi mandiri dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani (Hermanto & Swastika, 2011)

Pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya adalah upaya pemberian daya atau keberdayaan kepada masyarakat (Margayaningsih, 2016), berdasarkan defensinya menurut Aprillia Theresia (2015:91) bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki (Soetarto et al., 2019). Disisi lain pembedayaan masyarakat diartikan sebagai kegiatan sosial di mana sekelompok orang dalam komunitas merencanakan dan melaksanakan tindakan praktis berdasarkan sumber daya yang tersedia dan berfokus pada pemenuhan kebutuhan sosial (Gunawan, 2009). Salah satu program pemberdayaan yang strategis dapat dilakukan melalui kelompok tani, dalam hal ini kelompok tani dapat diartikan sebagai sebuah kesatuan sosial yang terdiri dari dua atau lebih individu yang terlibat dalam interaksi yang sering dan intens, menghasilkan pembagian kerja, struktur, dan norma yang spesifik untuk unit tersebut. Selain itu, kelompok ini merupakan kumpulan individu dengan tujuan dan kepentingan yang serupa, Gerungan (dalam Mardikanto, 2009). Selanjutnya Menurut Departemen Pertanian (2007) (dalam Fqih, 2016), Istilah "kelompok petani" merujuk pada sekelompok petani yang terdiri dari dewasa (pria dan wanita) dan petani taruna (pemuda/i) yang secara tidak resmi bersatu dalam area kelompok oleh kebutuhan dan keharmonisan bersama. Para petani ini dipimpin dan dipengaruhi oleh kontak petani. Adapun ciri khas yang terdapat pada kelompok tani ini selain memiliki area pertanian yang menjadi tanggung jawab bersama di antara anggota dan kegiatan yang menguntungkan sebagian besar anggota mereka melalui kelompok tani (poktan), kelompok tani juga ditandai dengan saling kenal, kedekatan, dan kepercayaan di antara semua anggota poktan (Sunarti, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwasanya Pemberdayaan petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan petani untuk melaksanakan usaha tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan petani. Kelembagaan petani merupakan lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk petani guna memperkuat kerjasama dalam memperjuangkan kepentingan petani dalam bentuk kelompok tani (poktan) dan gabungan kelompok tani (gapoktan) (Nurhamidin dkk., 2020)

Dalam hal ini dapat dilihat, ujung tombak sistem hirarki pemerintahan yaitu Pemerintah Desa berperan penting dalam mewujudkan pembangunan di desa, termasuk terciptanya komunitas petani (Malindir & Mashud, 2022). Mengingat keadaan yang terjadi di Desa Sidulang sesuai saat ini seperti yang sudah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwasannya masih minimnya peran pemerintah desa dalam mengelola dan memberdayakan masyarakat setempat serta lemahnya hubungan dan kerjasama dari masyarakat dengan pemerintah dalam mengembangkan sektor pertanian di Desa Sidulang. Pada hakikatnya program pemerintah dalam hal pemberdayaan mempunyai patriarki yang kuat di dalam kehidupan masyarakat khususnya Indonesia akhirnya menjadi penghalang untuk pemberdayaan (Hastuti & Respati, 2009).

Hal demikian yang akhirnya melatarbelakangi penulis untuk meninjau dan menganalisis kondisi kelompok tani di Desa Sidulang dengan tujuan untuk menjelaskan mengenai peran dari pemerintah desa terhadap pemberdayaan kelompok tani menggunakan teori dari Labolo (2010:36) bahwasannya peran pemerintah terkait fungsi pemberdayaan diantaranya mencakup: 1) Sebagai *regulator*, maksudnya bahwa sebagai pemerintah pedoman dasar yang dipedomani oleh masyarakat serta memiliki tanggungjawab yang mampu menggerakkan dan menyiapkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam hal penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan serta mampu menerapkan peraturan terhadap masyarakat guna dalam meningkatkan kualitas dan taraf kehidupan masyarakat agar tertib dalam mematuhi peraturan yang ada; 2) Sebagai *dinamisor*, upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat bergerak dan berpartisipasi dalam pemeliharaan serta pertumbuhan pembangunan lokal dikenal sebagai dinamisiator. Dalam hal ini pemerintah adalah memberikan nasihat dan arahan yang komprehensif kepada masyarakat secara efektif, terlepas dari perbedaan strata sosial. Melihat situasi itu, maka kebutuhan masyarakat yang masih banyak belum terpenuhi dan membutuhkan peran besar dari pemerintah dalam memelihara kesatuan masyarakat serta menjaga dinamika/kestabilan pemerintah dalam menjalankan perannya terhadap masyarakat; 3) Sebagai *fasilitator* merupakan upaya untuk menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi mereka yang melaksanakan pembangunan, membantu menjembatani kesenjangan antara masyarakat sebagai salah satu penggerak dan harapan pemerintah sebagai aparat pemerintah, serta berkontribusi pada optimalisasi operasi pembangunan daerah. Dalam kapasitas mereka sebagai fasilitator, pemerintah harus bertindak sebagai agen atau peserta yang merancang dan menyediakan fasilitas sesuai dengan tuntutan masyarakat sambil

memperhatikan lingkungan yang aman, tenang, dan tertib. Dalam hal ini, hal tersebut dapat mencakup semua infrastruktur dan fasilitas, aksesibilitas yang baik antara anggaran maupun SDM.

Beberapa penelitian terdahulu yang penulis gunakan sebagai pertimbangan ataupun rujukan dalam penelitian ini diantaranya;

1. Ita Ulumiyah, Peran Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi di Desa Sumberpasir, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang). Mayoritas penduduk di Desa Sumberpasir adalah petani, dan populasi usia produktif cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah, menurut realitas saat ini di desa tersebut serta tingkat pendidikan masyarakat yang usia produktif cenderung masih rendah (Ulumiyah, 2013).
2. Gleydis Susanti Oroh, Peran Menganalisis elemen-elemen yang mendukung dan menghambat upaya pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat di Desa Tumaratas, Kecamatan Langowan Barat, Kabupaten Minahasa, serta peran yang dimainkan oleh pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok masyarakat di sektor pertanian (Oroh, 2014).
3. Yana Sahyana, Sebuah penelitian tentang Desa Sukamulya, Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, meneliti peran pemerintah dalam memberdayakan masyarakat. menjelaskan bagaimana pemerintah desa dapat memberdayakan Desa Sukamulya di Kecamatan Pakenjeng, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Ini karena pertanian menyediakan sebagian besar pendapatan desa, dan kelompok usia produktif cenderung memiliki tingkat pendidikan yang rendah (Sahyana, 2017).

Bagi penulis penelitian terdahulu yang dijelaskan di atas dapat memberikan gambaran dan pemahaman mengenai pemerintaah dalam pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis guna untuk menjelaskan mengenai peran peran pemerintah desa dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Sidulang Kecamatan Laguboti Kabupaten Toba.

Metodologi

Seperti yang disampaikan oleh Creswell (Wisler, 2009) "Penelitian kualitatif merupakan sarana untuk menggali dan memahami makna yang dianggap oleh individu atau kelompok yang berasal dari masalah sosial atau manusia,". Penulis menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis pada penelitian ini, pemilihan jenis metode ini bertujuan agar mempermudah dalam memperoleh informasi dari dari berbagai narasumber yang dijadikan sebagai data utama. Sementara itu menurut David Williams penelitian kualitatif segala usaha peneliti dalam mengumpulkan data dari sumber yang alamiah serta dapat dipertanggungjawabkan (Moelong, 2013). Keadaan atau kejadian yang akan dijelaskan menggunakan metode deskriptif kualitatif pada penelitian ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber, mengumpulkan informasi dari hasil sesi tanya jawab, dan menggambarkan serta mengilustrasikan situasi terkini yang mengelilingi objek penelitian berdasarkan fakta dan data yang telah muncul untuk menyelidiki dan menyelesaikan masalah.

Penelitian ini dilaksanakan bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022 di Desa Sidulang, Kec. Laguboti Kab. Toba. Yang menjadi informan dalam penelitian ini merupakan individu yang langsung berhadapan dengan objek penelitian dan terbagi menjadi 3 seperti yang jelaskan oleh Bagong Suyatno bahwasannya Informan kunci, informan utama, dan informan tambahan adalah jenis dari informan penelitian ini (Suyanto, 2005).

Dalam mengumpulkan data, penulis menggunakan metode berikut: 1) Pengamatan langsung terhadap objek penelitian disebut observasi. Observasi adalah metode pengumpulan data yang bersifat naturalistik, berkaitan dengan dan berlangsung di mana para peserta terlibat secara aktif (Supriyadi, 2011); 2) Wawancara merupakan salah satu usaha untuk mengetahui gambaran dalam dalam penelitian. Pendapat lainnya juga disampaikan oleh Esterberg bahwasannya sebuah pertemuan di mana dua orang atau lebih berkumpul untuk berbagi ide atau informasi dengan menggunakan gaya tanya jawab disebut wawancara, dari percakapan tersebut dapat diperoleh informasi dan dan kesimpulan dari permasalahan yang ada, dalam metode kualitatif, wawancara ialah salah satu metode yang efektif untuk memperoleh informasi (Sugiyono, 2015); 3) Dokumentasi adalah peristiwa masa lalu yang diperoleh baik melalui tulisan, foto, atau karya kreatif oleh seseorang. Maka dalam penelitian ini penulis mengambil dokumentasi berupa gambar bersama dengan narasumber, atau sedang mewawancarai narasumber.

Analisis data Menurut Miles dan Huberman sama halnya seperti analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini, yaitu (Miles & Huberman, 1992):

- a. Pengumpulan Data, mengumpulkan informasi dari observasi, wawancara, dokumentasi, dan sumber pendukung lainnya adalah langkah pertama dalam proses pengumpulan dan analisis data. Tanggapan informan dan deskripsi tentang masalah-masalah yang terjadi dalam kelompok tani di Desa sidulang.
- b. Reduksi Data, merupakan tahap dari teknik analisis data dengan bentuk penyederhanaan, penggolongan, dan menyaring data sehingga menghasilkan informasi yang berkualitas mudah, dan dapat dipergunakan dengan baik.
- c. Penyajian Data, data yang telah disusun untuk memberikan gambaran mengenai tindakan mengenai peran, fungsi dan tantangan pemerintah desa dalam upaya pemberdayaan kelompok tani di Desa Sidulang.

Serta menggunakan teknik pemilihan informan yang dikemukakan oleh Menurut Sugiono (2009), dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang lebih sering digunakan adalah *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tau tentang apa yang kita harapkan. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar(Chan dkk., 2020).

Metodologi ini diharapkan dapat membantu penelitian memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran dari pemerintah desa memberdayakan kelompok tani di Desa Sidulang, Kecamatan Laguboti, Kabupaten Toba.

Pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari kesediaan pemerintah untuk memberikan arahan, bimbingan, dan pembinaan kepada masyarakat, dalam hal ini, arahnya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cara yang lebih efisien dan efektif dalam memberdayakan masyarakat. Memperkuat peran lembaga

masyarakat desa bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat desa dalam melaksanakan kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat itu sendiri melalui pelaksanaan program pemberdayaan yang diberikan kepada masyarakat desa, baik secara langsung maupun tidak langsung (Tan, 2024). Pengembangan dan pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani di Desa Sidulang tidak dapat dipisahkan dari fungsi pemerintah desa sebagai penggerak kemajuan desa. Berbicara tentang peran pemerintah, peneliti menemukan sejumlah metrik untuk mengukur seberapa jauh peran pemerintah Desa Sidulang memberdayakan kelompok tani dalam tiga aspek, diantaranya:

1. Peran Pemerintah sebagai Regulator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Untuk mengatur isu-isu yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat, pemerintah dalam kapasitasnya sebagai regulator, harus menetapkan aturan yang kemudian dijelaskan, dipahami, dan diterima oleh masyarakat setempat. Seperti yang diharapkan inisiatif pemberdayaan masyarakat akan tercapai, jika adanya kebijakan yang tepat dan jelas sehingga mendukung jalannya pengembangan masyarakat. Kebijakan yang dimaksud ialah berupa aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai pegang pemerintah dalam membatasi gerak dan langkah manusia/kelompok dalam melaksanakan aktivitasnya, sehingga aturan yang sudah dibuat dapat dilaksanakan sesuai prosedurnya untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan menyeluruh.

Melalui temuan yang dilakukan melalui observasi lapangan langsung dan wawancara, ditemukan bahwa pelaksanaan program pemberdayaan kelompok Tani di Desa Sidulang belum terlaksana. Artinya belum memiliki dasar hukum atau kebijakan yang mengarah pada pola pengembangannya, sehingga hal ini jika ditinjau dari sisi regulator atau kebijakannya belum ada, dan perlu perhatian khusus dari pemerintah. Pemerintah Desa perlu meninjau kembali peraturan yang ada ditingkat Pusat dan Daerah sebagai bahan referensi dan pertimbangan dalam membuat kebijakan berupa peraturan di Desa Sidulang dalam mengembangkan kelompok tani dengan terpenuhi tujuan untuk kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup petani khususnya di Desa Sidulang. Kebijakan berupa peraturan tentang pemberdayaan kelompok tani sudah ada ditingkat daerah, hanya saja belum dibentuk dalam peraturan desa maupun belum disosialisasikan secara langsung kepada masyarakat. Walaupun ada aturan dan SOP dari pusat maupun dari PERDA namun hal tersebut juga belum di pahami oleh masyarakat khususnya kelompok tani. Hal ini dikarenakan tidak adanya sosialisasi ataupun informasi yang diberikan pemerintah desa selaku pemerintah yang berhubungan dekat dengan masyarakat. Artinya pemerintah desa tidak mampu berperan dalam mensosialisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada seluruh masyarakatnya. Pada dasarnya salah satu pendorong utama pertumbuhan desa dan pemberdayaan masyarakat adalah administrasi desa.

Melihat kondisi ini, dapat dinilai bahwasannya pemerintah desa tidak memberikan perhatian khusus kepada masyarakat sekitar, terbukti dengan tidak

adanya program sosialisasi dan pemahaman yang jelas kepada kelompok tani. Hal ini merupakan suatu hal yang buruk dan perlunya perubahan yang lebih baik lagi kedepannya, agar mampu mewujudkan pemberdayaan kelompok tani yang berkualitas, maju dan makmur. Disaat inisiatif pemerintah dilaksanakan, sangat penting untuk memberikan pengetahuan dan pelatihan kepada masyarakat, masyarakat tidak akan mampu mengimplementasikan sesuatu dengan baik, jika tidak di dukung dengan edukasi dan pendampingan dari pemerintahnya.

2. Peran Pemerintah Desa sebagai dinamisator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Sebagai pemilik peran dinamisator, tugas pemerintah desa adalah memberikan arahan dan kepemimpinan kepada masyarakat dengan cara yang efisien dan menyeluruh yang menguntungkan semua orang tanpa membedakan berdasarkan status sosial ekonomi. Mengingat kebutuhan komunitas yang cepat berkembang, keterlibatan pemerintah dalam mengendalikan, memberi nasihat, dan menjaga kesejahteraan petani sangat penting. Melalui organisasi pemerintahan diharapkan dapat memberika edukasi dan bimbingan pelatihan kepada semua elemen terkait dan masyarakat, dengan beberapa cara yaitu:

a. Sosialisasi

Pemerintah Kecamatan kurang aktif dalam berpartisipasi dalam kegiatan kelompok tani, pihak Kecamatan hanya menunggu informasi dari Kabupaten Toba atau pihak PPL tanpa mencari informasi terlebih dahulu, artinya pihak Kecamatan bersifat menunggu tanpa mengejar informasi yang seharusnya bisa di akses dengan mudah dan cepat. Melihat situasi ini, maka dapat diketahui dalam memberdayakan kelompok tani peran dari pemerintah baik itu Kecamatan sampai dengan Desa Sidulang belum terlaksana dengan optimal. Hal ini dibuktikan bahwa kegiatan sosialisasi yang dianggap mampu menjadi jalan utama dalam keberhasilan suatu daerah/desa ternyata tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan minimnya koordinasi antara pihak Kecamatan, Desa dan pihak PPL. Tidak sesuai jadwal dalam kegiatan sosialisasi menimbulkan kekecewaan dan ketidakpercayaan masyarakat akan peran dan fungsi pemerintah sebagai ujung tombak keberhasilan daerah.

Dapat diketahui bahwasannya pelaksanaan sosialisasi belum terlaksana dengan efektif, rutin dan menyeluruh. Diketahui bahwa sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat atau kelompok tani sangat jarang dan tidak sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat atau kegiatan tersebut sering dibuat secara mendadak tanpa adanya himbauan dan undangan terlebih dahulu. Sehingga tidak semua masyarakat memiliki kesempatan dan waktu untuk bergabung dalam kegiatan tersebut apabila dilakukan secara mendadak. Hal inilah yang menjadi penyebab dari lemahnya pemahaman dan keterlibatan masyarakat terkait pemberdayaan kelompok tani dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. Pedampingan

Untuk memperdalam kajian masyarakat tentang pemberdayaan kelompok tani, tentunya dibutuhkan peran pendamping. Peran pendamping yang dimaksud disini ialah tenaga ahli yang paham akan pemberdayaan kelompok tani serta mampu mewujudkan interaksi komunikasi yang efektif, memberikan motivasi kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan potensi kelompok petani guna meningkatkan standar hidup.

Penyelenggaraan kegiatan yang bersifat sosial dan pemberdayaan masyarakat dibutuhkan peran pendamping dalam pemberdayaan petani, namun hal ini tidak dapat terlaksana dengan efektif, disebabkan tidak ada tindak lanjut sosialisasi dari pemerintah setempat dalam memberikan pendampingan secara rutin dan menyeluruh. Pendampingan di Desa Sidulang tidak sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang sudah dibuat, hal ini dibuktikan dengan banyaknya agenda pendampingan yang belum dipenuhi pihak pemerintah atau PPL. Dari sekian banyak agenda hanya beberapa kali saja yang terlaksana. Dan hal ini juga tidak dilakukan setiap bulan apalagi setiap minggu. Kondisi yang terjadi saat ini ialah terkait masalah faktor kurangnya sumber daya manusia dalam sistem pendampingan kelompok tani. PPL hanya dapat memberikan dukungan rata-rata sekali sebulan, dan tidak jarang satu kelompok petani tidak mendapatkan bantuan selama sebulan. Ini karena ada banyak kelompok petani yang membutuhkan bantuan, tetapi PPL hanya satu orang yang bisa memberikannya.

c. Pelatihan

Acara dalam agenda pelatihan telah direncanakan dengan cermat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman komunitas sebagai kelompok petani. Pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat yang disampaikan oleh kelompok tani adalah alat penting untuk menilai dan mencapai pembangunan masyarakat. Jumlah sesi pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah sangat minim dibandingkan dengan kebutuhan pengetahuan para petani, yang seharusnya memerlukan banyak sesi pelatihan, menunjukkan bahwa pelaksanaan pelatihan di organisasi petani masih jauh dari harapan. Disatu sisi pemerintah desa setempat sebagai garda terdepan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat kurang dilibatkan dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat petani.

Dalam aspek pelatihan pemerintah masih minim dalam memberikan pelatihan kepada masyarakat, kurang aktifnya pemerintah dalam hal memberikan pelatihan kepada masyarakat karena kurangnya koordinasi anantara semua instansi yang terkait. Lemahnya sinergitas ini, mengakibatkan Pemerintah Desa sendiri kurang aktif dalam membimbing, mengarahkan dan menyebarkan informasi kepada kelompok tani. Akibatnya, dapat dilihat bahwa pemerintah belum berhasil memberdayakan komunitas pertanian di Desa Sidulang melalui pelatihan komunitas. Melihat kegiatan pelatihan yang

hanya mampu dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, lantas hal ini disebut tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat padahal Desa Sidulang adalah salah satu Desa yang perlu perhatian khusus dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dipandang dari sudut petaninya.

d. Kunjungan Lapangan

Kegiatan ini tentunya lebih terarah dan terstruktur disebabkan karena sudah memiliki jadwal untuk berkunjung ke Desa binaanya. Dalam hal mengunjungi masyarakat bertujuan untuk mengamati secara langsung permasalahan, keterampilan yang dimiliki masyarakat serta kegiatan masyarakat sehari-hari. Namun wewenang yang diberikan kepada PPL tersebut tidak mampu diterapkan dengan baik. Padahal pihak Pemerintah Kabupaten sudah mempercayakan jadwal dan sebagainya kepada pihak PPL yang jauh lebih paham dengan dunia pertanian, kunjungan yang dilakukan ke lapangan dengan tujuan berhadapan langsung dengan masyarakat merupakan sebuah tugas demi keberlangsungan pemberdayaan masyarakat agar sesuai prosedur dan menjadi lebih baik lagi. Namun yang menjadi hambatan saat ini ialah keterbatasan SDM PPL yang turun ke lapangan. Yang hanya turun Cuma 1 orang saja, sementara kelompok taninya cukup banyak. Hal ini tidak seimbang, sehingga mengakibatkan ketimpangan dan tidak meratanya pemahaman ke masyarakat. Keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh kelompok petani dalam mengelola hasil pertanian mereka sangat terpengaruh oleh ketidakhadiran baik pemerintah maupun PPL, padahal kunjungan lapangan ke masyarakat adalah harapan dan impian yang diinginkan oleh kelompok tani dalam menambah wawasan dan keilmuan mereka tentang bagaimana pemberdayaan masyarakat melalui program kelompok tani ini dapat menghasilkan output dan luaran yang bermanfaat

Pada pembahasan ini dibahas tentang indikator dinamisator yang didalamnya terdapat kajian tentang (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menggambarkan bahwa dari 4 (empat) indikator tersebut mengarahkan pada sisi negatif yang hanya dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa membuat susunan jadwal yang sudah tertata sehingga dampaknya kurang baik dalam prose ke depannya. Sama halnya dengan subindikator pendampingan dan pelatihan dalam hal ini juga masih tergolong rendah, karena pemerintah selaku organisasi pemerintahan yang diharapkan belum mampu memenuhi dan mengaktifkan kembali pelatihan secara ruti kepada kelompok tani.

3. Peran Pemerintah sebagai Fasilitator dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemerintah berfungsi sebagai fasilitator dalam berbagai cara, termasuk dengan memungkinkannya bertindak sebagai agen yang dapat merancang dan menyediakan fasilitas yang dengan aman, nyaman, dan terbuka memenuhi kebutuhan masyarakat. Infrastruktur dan fasilitas untuk pengembangan jangka

panjang, baik secara anggaran maupun SDM, dapat disediakan oleh fasilitas tersebut. Pemerintah juga sebagai motor penggerak dalam pendampingan masyarakat melalui berbagai program yaitu, pendidikan, pelatihan dan pendampingan keahlian serta membantu dalam hal pendanaan guna mempermudah masyarakat dalam mengembangkan skill dan juga membantu dalam memperoleh modal yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pertanian, sedang berupaya untuk menyediakan bantuan kepada masyarakat dalam bentuk benih, pupuk, dan kebutuhan produksi lainnya untuk semua kelompok petani guna memenuhi permintaan masyarakat. Tujuan pemberi bantuan ini harapannya dengan adanya dukungan bantuan peralatan ini mampu meningkatkan tata kelola dan inovasi baru dari para kelompok tani dalam mengembangkan skill dan kemampuan. Penyaluran bantuan pemberian bibit, pupuk dan fasilitas produksi lainnya di Desa Sidulang ini bersumber dari dana APBD daerah telah dilaksanakan, bantuan yang sudah disalurkan terhadap masyarakat berjalan sesuai prosedur dan cukup efektif hanya saja perlu peningkatan jumlah bantuan yang diberikan. Hal ini diharapkan agar seluruh masyarakat menerima secara merata/adil, terlepas dari tidak meratanya bantuan tersebut, masyarakat juga mengalami permasalahan, masyarakat dianggap tidak pandai menggunakan alat dan seakan-akan alat itu tidak dipakai untuk nilai yang bermanfaat.

Jelas bahwa posisi pemerintah sebagai fasilitator pemberdayaan masyarakat ditunjukkan oleh cara bantuan yang didistribusikan, yang mematuhi persyaratan anggaran daerah (APBD). Namun perlengkapan tersebut belum sepenuhnya mampu memfasilitasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di lapangan. Alat dan fasilitas lainnya belum merata, sehingga menimbulkan kekecewaan dan rasa iri di kalangan masyarakat, mengingat semua kelompok tani berharap agar fasilitas tersebut dapat dipergunakan dan diolah sama semua kelompok sehingga tidak ada lagi tingkat kecemburuan sosial di lingkungan Desa Sidulang.

Kesimpulan

Peran Pemerintah Desa Sidulang dalam pemberdayaan kelompok tani dilihat dari aspek pertama yaitu: Regulator tentang pemberdayaan kelompok tani masyarakat pada umumnya tidak mengetahui tentang aturan dan kebijakan yang mengikat masyarakat untuk diberdayakan. Yang kedua aspek dinamisator yang kemudian didalamnya terdapat subindikator (1) sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan dan (4) Kunjungan lapangan, menunjukkan bahwa dari subindikator yang disebutkan, keseluruhan sub indikator masih kurang efektif sehingga perlu perbaikan kedepannya. Yang terakhir yaitu: aspek Fasilitator ketersediaan bibit, pupuk, dan sarana produksi lainnya bahwa pemerintah sebagai ujung tombak harapan masyarakat sudah berupaya memberikan yang layak dengan memenuhi beberapa alat dan kebutuhan lainnya, namun jumlahnya masih kecil dan tidak sebanding dengan jumlah kelompok petani yang sekarang terdaftar di Desa Sidulang.

Saran penulis dalam penelitian ini guna untuk meningkatkan pengembangan kelompok tani Desa Sidulang di tahun-tahun berikutnya ialah, pemerintah diharapkan dapat aksis dan update terhadap seluruh masyarakat dalam berbagai informasi, mampu sebagai penyedia yang dapat memotivasi dan memberikan arah perkembangan dan kemajuan kepada masyarakat serta meningkatkan kegiatan sosialisasi maupun pendamping secara rutin dan menyeluruh kepada seluruh kelompok tani di Desa Sidulang juga meningkatkan dan mengelola sarana dan prasarana Desa menjadi lebih baik lagi sehingga mempermudah proses pertanian di Desa Sidulang.

Daftar Pustaka

- Ahmar, Mappamiring, & Parawangi, A. (2016). Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Petani Padi di Desa Parumpanai Kecamatan Wasumpoda Kabupaten Luwu Timur. *Jurnal Administrasi Negara*, 2(2), 120–136.
- Bagong, Suyanto. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada. Grup Media.
- Hariadi, & Samsi, S. (2011). *Dinamika kelompok: Teori dan aplikasinya untuk analisis keberhasilan kelompok tani sebagai unit belajar, kerjasama, produksi dan bisnis*. Sekolah Pascasarjana UGM. Yogyakarta.
- Hastuti & Respati, D. (2009). Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Berbasis Pemanfaatan Sumberdaya Perdesaan Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Perdesaan (Studi Di Lereng Merapi Daerah Istimewa Yogyakarta). UNY: *Naskah Jurnal*.
- Hermanto, & Swastika. (2011). Penguatan kelompok tani: Langkah awal peningkatan kesejahteraan petani. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 9(4), 371–390.
- Labolo, M. (2010). *Memahami ilmu pemerintahan: Suatu kajian, teori, konsep, dan pengembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Malindir, G. O., & Mashud, A. B. (2022). Pemberdayaan Kelompok Tani Dalam Meningkatkan Hasil Pertanian Di Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 15(2), 39–55. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v15i2.2775>
- Mardikanto. 2009. *Sistem Penyuluhan Pertanian*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Margayaningsih, D. I. (2016). Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan. *Pemberdayaan Masyarakat Desa Sebagai Upaya Penanggulangan Kemiskinan*, 9(1), 158–190. <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/77/71>
- Menteri Pertanian. (2013). *Peraturan Menteri Pertanian tentang pedoman pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013*. Jakarta: Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP
- Moleong, L. J. (2013). *Metode penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mutmainna, I., Hakim, L., & Saleh, D.(2016). Pemberdayaan kelompok tani di kecamatan marioriwawo kabupaten soppeng. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(2), 269–283.

- Nurhamidin, A. N., Tulus, F., & Ruru, J. M. (2020). Pemberdayaan Kelompok Tani Padi di Desa Ikhwan Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Administrasi Publik*, 6(88), 1–9.
- Oroh, G. S. (2014). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat kelompok masyarakat di bidang pertanian Desa Tumaratas Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 3(2). Diakses dari <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/6723>.
- Peraturan Bupati Toba Nomor 53 Tahun 2021. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Tani.
- Rabiatul Saufiah, Arpandi, & Hasbiyah, S. (2024). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat. *Jurnal MSDM: Manajemen Sumber Daya Manusia*, 1(3).
- Sahyana, Y. (2017). Peran pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat (Studi pada Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat). Diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/5629/1/Peran%20Pemerintah%20Artikel.pdf>.
- Soetarto, Simbolon, B. R., & Zebua, S. (2019). Peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan kelompok tani untuk meningkatkan hasil panen padi. *Junral Governance Opinion*, 4(1), 150–169.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Sunarti, N. (2019). EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN DALAM PENGEMBANGAN KELOMPOK TANI DI PEDESAAN. *Jurnal MODERAT*. 2401-8149-1-Pb. 5.
- Supriyadi. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*, Yogyakarta: Cakrawala Ilmu.
- Suyanto, B., & Sutinah. (2007). *Metode penelitian sosial*. Jakarta: Kencana.
- Syahyuti. (2007). Kebijakan pengembangan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN) sebagai kelembagaan ekonomi di perdesaan. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*, 5(1).
- Tan, F. (2024). KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN. *JOURNAL OF ETHNIC DIVERSITY AND LOCAL WISDOM* 5(2), 1–15.
- Theresia, Aprillia dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat acuan bagi praktisi, akademisi dan pemerhati pengembangan masyarakat*. Alfabeta. Bandung.
- Ulumiyah, I. (2013). Peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat desa (Studi pada Desa Sumberpasir Kecamatan Pakis Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(5), 890–899.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013. (2013). *Perlindungan dan Pemberdayaan Petani*. Jakarta: Lembaran Negara Republik Indonesia.
- Wisler, A. K. (2009). 'Of, by, and for are not merely prepositions': teaching and learning Conflict Resolution for a democratic, global citizenry. 55 *Intercultural Education*, 20(2), 127–133. <https://doi.org/10.1080/14675980902922143>.